

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Barda Nawawi Arief. (2008). *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan penyusunan Konsep KUHP Baru*, Semarang, Kencana Prenada Media Group.
- Bram Deni. (2014). *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Setara Press, Malang.
- Budiman. (2001). *Prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan*, Astra Grafindo.
- Gatot Supramono. (2012). *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Hernadi Affandi, (2016), *Pengertian Pemerintahan Daerah Menurut Doktrin, Materi Perkuliahan*
- HS, Salim. (2005). *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Indroharto, (1994), *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Effendi Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Inu Kencana, (2013), *Ilmu Negara Kajian Ilmiah dan Keagamaan*, Pustaka Reka Cipta, Bandung.
- Jimly Asshiddiqie. (2010). *Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Rajawali Pers).
- Jimly Asshiddiqie, (2014), *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, (2015), *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

- Koesnadi Hardjasoemantri. (1999). *Hukum Tata Lingkungan*, Cetakan ke-14, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Lilik Mulyadi, (2008). *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, PT. Alumni Bandung.
- Manik. (2016). *Pengantar Prinsip Pembangunan Berkelanjutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Miriam Budiardjo, (1998), *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Muh. Erwin. (2011). *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- Moh. Ali Mahrus, Sri Kurnia Mahruni. (2018). *Dampak Pembangunan Pabrik Semen, Ratusan Petani Terancam Kekeringan*. Jatimtimes.com.
- Nandang Sudrajat, (2010). *Teori dan Praktik Pertambangan di Indonesia*. Pustaka Yustitia.
- Nugroho, Riant. (2004). *Kebijakan publik*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant. (2009). *Public Policy*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Nur Basuki Winarno, (2008), *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, laksana mediatama, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. (2010). *Penelitian Hukum*, cet VI, Jakarta: Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana.
- Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang, Makalah*, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Rizki Rahayu Fitri Eka N.A.M. Sihombing, (2019). *Kajian Yuridis Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Penetapan Kebijakan Rencana Pembangunan Nasional*.
- Rendy Adiwilaga, Yani Alfian, Ujud Rusdia, (2018). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Deepublish.
- Ronny Hanitijo Soemantri. (1984). *Masalah-masalah Sosiologi Hukum*, Bandung, Sinar Baru.

- Said Zainal Abidin, (2012) *Kebijakan publik*. Jakarta; Salemba Humanika.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (1994). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Surya Djajadiningrat. (2013). *Proses Pembangunan Berkelanjutan*, Yogyakarta.
- Sutedi, Adrian. (2011). *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.

JURNAL

- Al Idrus, Syarifa Wahidah. (2013). Pencemaran Udara Akibat Pengolahan Batu Kapur Di Dusun Open Desa Mangkung Praya Barat. *Jurnal Pijar Mipa*, 8(2).
- Fazlur Rahman, Muhammad Ashri, dan Tri Fenny Widayanti. (2013). *Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia (Studi Kasus di Mesuji Sumatera Selatan)*.
- Gofur, M. A., & Wesnawa, I. G. A. (2018). Dampak Ekologi Penambangan Batu Kapur Sebagai Bahan Dasar Pembuatan Semen di Gunung Sadeng Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. *Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha*, 6(3).
- Hakim, M. R. (2015). Model Pengelolaan Lingkungan Pertambangan Batu Kapur Terhadap Potensi Kerusakan Lingkungan dan Sikap Masyarakat di Gunung Jaddih Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan. *Bencana Dan Lingkungan Geologi*, 1–7.
- Lian Polyan Watumlawar Watumlawar, Lakon Utamakno. (2021). Analisis Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Serta Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Penambangan Batu Gamping Di Pt. Pertama Mina Sutra Perkasa, Desa Grenden, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Jawa Timur. *Jurnal Seminar Nasional Sains dan Teknologi Terapan* (Vol. 9, No. 1, pp. 289-296).

- Marilang. (2011). Pengolahan Sumber Daya Tambang. *Jurnal Al-Risalah*, 11(10).
- Marthen B. Salinding. (2019). Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak Kepada Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Konstitusi*, 16(1),.
- Muhammad Azhar, (2015). Relevansi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam Sistem penyelenggaraan administrasi Negara. *Jurnal NOTARIUS*, 8(2), 274–286.
- Priyanta, Maret. (2015). Pembaharuan dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Lingkungan dan Penataan Ruang Menuju Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Law Review*. Vol. 1, Issue 3:341.
- Regian, Anyke Putri. (2016). Strategi Pemerintah dalam Menanggulangi Tambang Liar Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kediri (*Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang*), 1-22.
- Siti Rahayu Estu Ningrum, Arif Nur Widyatama, & Rofi Sri Utami. (2023). Ruang Sempit Petani Puger Pasca Industrialisasi. *Jurnal Sosiologi Pertanian dan Agribisnis*, 5(2), 01-18.
- Slamet Hartono, (2013). Desentralisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat, *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(18)
- Sujono. (2004). Geologi dan Mula jadi Emas, *Jurnal Mineral dan Batubara*.
- Sudono Syueb, (2008), Dinamika Hukum Pemerintahan Daerah sejak kemerdekaan sampai era reformasi, *Laksbang Mediatama*. 30

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Negara.

Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah 77 Tahun 2001 Tentang Irigasi.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2023.

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Tanggung Jawab Perusahaan dan Lingkungan.

INTERNET

[Semen Puger \(meichapuspita.blogspot.com\)](http://meichapuspita.blogspot.com) diakses pada tanggal 8 april 2023.

[RECHT: HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH DI ERA OTONOMI DAERAH](#) oleh: Riski Febria Nurita diakses pada tanggal 15 mei 2023.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-pol> diakses pada tanggal 12 mei 2023.

<https://www.mongabay.co.id/2020/11/05/> diakses pada tanggal 30 mei 2024.

<https://ikilhojatim.com/pemkab-jember-lamban-tangani-konflik-petani-puger-raturan-kader-pmii-jember-turun-aksi/> diakses pada tanggal 30 mei 2024.

<https://walhijatim.org/2020/09/12/pemkab-jember-harus-kembalikan-segera-saluran-irigasi-petani-puger/> diakses pada tanggal 30 mei 2024.

<https://radarjember.jawapos.com/nasional/791095568/sepakat-pembelokan-kanal-irigasi-dihentikan> diakses pada tanggal 01 juni 2024.

<https://cahayabaru.id/2020/07/25/pt-semen-imasco-asiatic-puger-jember-diduga-disuplai-tambang-ilegal/> diakses pada tanggal 01 juni 2024.

<https://www.barathanews.com/2020/03/pemkab-telah-perintahkan-pt-imasco.html>

diakses pada tanggal 01 juni 2024.

<https://jemberkab.bps.go.id/statictable/2021/10/27/281/luas-panen-rata-rata-produksi-dan-total-produksi-padi-menurut-kecamatan-di-kabupaten-jember-2020.html> diakses pada tanggal 14 juli 2024.

